



**RILIS KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT PERSIAPAN DAN KESIAPAN PILKADA SERENTAK 2024
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024 – 2025
KE PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL 13 – 15 NOVEMBER 2024**

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Tengah (13-15 November 2024) dalam rangka meninjau kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Dalam kunjungan tersebut, DPR RI meminta seluruh jajaran ASN, pejabat kepala daerah, hingga penyelenggara pilkada netral dan berintegritas.

"Selain kesiapan anggaran dan sarana prasarana, yang juga menjadi perhatian dan sorotan yakni netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara). Saya yakin bapak - ibu semua berkomitmen dan bisa melakukan itu," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima saat membuka Kunjungan Spesifik di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (13/11/2024)

Untuk diketahui, acara kunjungan spesifik tersebut dihadiri oleh Pj Gub Jawa Tengah Nana Sudjana, Bupati- Walikota, Pj kepala daerah kabupaten - kota se Jawa Tengah, KPU - Bawaslu kab-kota se Jawa Tengah, Komisioner KPU dan Bawaslu RI, serta jajaran kepolisian dan kejaksaan daerah di Jawa Tengah. Adapun, anggota DPR RI yang hadir dalam kunjungan spesifik Komisi II DPR RI antara lain, Zulfikar Arse Sadikin, Shintya Sandra Kusuma, Arif Wibowo, Taufan Pawe, Andar Amin Harahap, Ahmad Wazir Noviandi, Iwan Kurniawan, Fauzan Khalid, M. Toha, Eka Widodo, Sahidin, dan Wahyudin Noor.

Aria Bima juga meminta jajaran pemerintah di daerah Jawa Tengah bersama KPU-Bawaslu untuk menggunakan cara-cara kreatif untuk mengajak pemilih pemula mau menggunakan hak pilihnya. Hal itu perlu dilakukan karena lebih dari 50% pemilih di Jawa Tengah merupakan generasi muda, yaitu generasi milenial dan generasi Z.

"Saya banyak bertanya ke pemilih muda, mereka antusias memilih karena ingin bikin konten tangannya sudah dicelupkan tinta hitam tanda sudah mencoblos, nah cara-cara semacam ini untuk perlu dipikirkan agar sosialisasi memilih bisa efektif," tutur Bima.

Adapun, Anggota DPR RI Taufan Pawe menegaskan integritas penyelenggara pilkada dan seluruh jajaran ASN menjadi hal utama yang mendasari terciptanya netralitas dari aparat dan penyelenggara pilkada.

"Yang utama itu integritas, sehingga ASN bisa netral, penyelenggara bisa profesional. Kalau itu sudah bisa dilakukan maka pilkada bisa berkualitas. Ini penting, karena politik dan pemerintahan itu menyangkut seluruh sendi kehidupan masyarakat," kata Taufan.

Sementara itu, Mohammad Toha, anggota DPR RI menekankan agar jaminan ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) bagi penyelenggara pilkada untuk dipermudah pencairannya. Hal itu karena Kemendagri sudah menerbitkan aturan dan dasar hukumnya.

Ihwal netralitas ASN, kesiapan sarana dan prasarana, serta pengamanan Pilkada, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menegaskan jajarannya telah siap. Seluruh anggaran hibah dari pemda kepada KPU dan Bawaslu serta aparat pengamanan pilkada sudah 100% disalurkan.

"Selain menjamin netralitas, kami juga sudah siapkan personil pengamanan. Daerah-daerah rawan konflik maupun rawan terjadi bencana alam saat pencoblosan pun sudah kami petakan," ujar Nana.

Semarang, 13 November 2024,

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah.